

## **Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Muadalah Berdasarkan Undang-undang Pesantren**

**Ahmadi\***

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep  
ahmadiborju@gmail.com

### ***Abstract***

This research seeks to describe the quality assurance system in three Muadalah Education Units in Madura with a multi-case qualitative approach in three muadalah pesantren in Madura. Data sources are the managers of muadalah education units in Madura, from Kiai and teachers who are directly involved in quality assurance. With data validity checking techniques with extended observation, triangulation and peer examination. From the results of the study, it was found that the managers of muadalah education units in Madura carry out quality assurance with two management models, namely first: attaching quality assurance to the structural duties of pesantren managers, and second, forming special work units as mandated by the Pesantren Law. From these two models, all muadalah education units in Madura make Kiai the main person responsible for the quality of the pesantren. The implementation of quality assurance in Muadalah Education Units in Madura has an impact on maintaining the education system of education with the uniqueness of each pesantren, as well as many outstanding santri in various competitions.

***Keywords:*** *Pesantren Law; Quality Assurance; Pesantren*

### ***Abstrak***

Penelitian ini berupaya menggambarkan sistem penjaminan mutu pada tiga Satuan Pendidikan Muadalah di Madura dengan pendekatan kualitatif multikasus di tiga pesantren muadalah di Madura. Sumber data para pengelola satuan pendidikan muadalah di Madura, dari Kiai dan guru-guru yang terlibat langsung dalam penjaminan mutu. Dengan teknik pengecekan keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi dan pemeriksaan sejawat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelola satuan pendidikan muadalah di Madura melaksanakan penjaminan mutu dengan dua model pengelolaan, yakni pertama: melekatkan penjaminan mutu dengan tugas struktural pengelola pesantren, dan kedua, membentuk unit kerja khusus seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Pesantren. Dari kedua model ini, semua satuan pendidikan muadalah di Madura menjadikan Kiai sebagai penanggungjawab utama mutu pesantren. Pelaksanaan penjaminan mutu di Satuan Pendidikan Muadalah di Madura berdampak pada terjaganya sistem pendidikan pendidikan dengan kekhasan masing-masing pesantren, serta itu banyak santri berprestasi dalam berbagai perlombaan.

***Kata Kunci:*** *Undang-undang Pesantren; Penjaminan Mutu; Pesantren*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai institusi pendidikan Islam, pesantren memiliki sejarah yang sama dengan proses penyiaran Islam di Indonesia (Hamzah, 2019; Qomar, 2007). Selain itu, pesantren sangat unik dan terpisah dari dunia luar, sehingga dianggap sebagai "subkultural" di Indonesia (Wahid, 2007).

Dalam perkembangan pesantren di Indonesia, lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan babak baru dalam sejarah pesantren. Undang-undang ini mengatur tata kelola dan majemen pesantren di antaranya pendirian dan penyelenggaraan, pendanaan, sistem penjaminan mutu, pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan pengelolaan data dan informasi juga diatur.

Salah satu amanah yang tertuang dalam undang yang disahkan oleh Presiden Indonesia pada 15 Oktober 2019 tersebut adalah pembentukan Majelis Masyayikh sebagai salah satu instrumen penting dalam pewujudan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren (Presiden, 2019). Keberadaan undang-undang ini bisa dimaknai bahwa pemerintah serius dalam memerhatikan mutu pendidikan pesantren.

Keberadaan Majelis Masyayikh adalah bertanggung jawab atas mutu pendidikan pesantren, termasuk menyusun sistem penjaminan mutu (Presiden, 2019). Sistem penjaminan mutu yang disusun tetap menjaga kekhasan, tradisi dan kemandirian pesantren. Sehingga dalam praktiknya Majelis Masyayikh mengadakan diskusi terpumpun bersama pengasuh pesantren dalam menggali beragam hal yang berkaitan kemajuan dan penjaminan mutu pesantren (Ditpontren, 2023b).

Pada 3 November 2023, Majelis Masyayikh menyelesaikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu dan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Mutu Pendidikan Pesantren. Dokumen tersebut diwujudkan dalam 5 buku yang mencakup 4 pendidikan formal pesantren dan 1 pendidikan nonformal pesantren. (Budiman et al., 2023).

Setelah memiliki dokumen sistem penjaminan mutu, Majelis Masyayikh melakukan sosialisasi akan pentingnya penjaminan mutu pesantren serta Dewan Masyayikh di level satuan lembaga akan menjadi implementor penjaminan mutu di lingkup institusi pendidikan (Ditpontren, 2023a).

Satuan Pendidikan Muadalah lebih dikenal dengan Pesantren Muadalah merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning, atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama (Pontren, 2012). Satuan pendidikan muadalah termasuk pendidikan pesantren yang harus mengikuti sistem penjaminan mutu yang diatur oleh Majelis Masyayikh.

Berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 2791 Tahun 2017, di Madura ada tiga Pesantren Muadalah, yakni: TMI Al-Amien Prenduan, MMI Mathlabul Ulum Lenteng Sumenep dan DMI Al-Hamidy Banyuwanyar Pamekasan.

Kajian tentang penjaminan mutu di Pesantren Muadalah Madura menjadi signifikan adanya. Karena keberadaan pesantren di Madura, terutama Kiai, merupakan penyangga kebudayaan masyarakat Madura dalam konsep *bhuppa'-babbhu'-guru-rato*.

Pada konsep ini dapat dipahami bahwa terdapat hirarki personal yang harus dipatuhi dan dihormati, yakni *bhuppa'-babbhu'* (ayah-ibu), *guru* (Kiai/Nyai), dan *rato* (pemerintah). Artinya ada figur utama yang harus dipatuhi oleh masyarakat Madura. Bahkan masyarakat Madura, terutama pedesaan, mengkontruksi Kiai sebagai pemimpin duniawi dan ukhrawi. Bahkan bisa disejajarkan dengan Wakil Tuhan di dunia (Hefni, 2007).

Konsep penyangga sosial masyarakat Madura di atas jika dikaitkan dengan penjaminan mutu pesantren yang harus menjadi sistem yang dijalankan untuk menjaga mutu pesantren yang tidak lagi berpatokan kepada figur Kiai yang memiliki otoritas mutlak dalam kepemimpinan di pesantren (Dhofier, 1984), akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan pesantren dengan diundangkannya UU tentang Pesantren.

Penelitian yang berkenaan dengan penjaminan mutu dan pesantren, setidaknya ada beberapa penelitian, diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Pathollah dan

Akhmad Ghasi. Penelitian di Pesantren Manbaul Ulum ini membahas tentang implementasi Total Quality Management (TQM) model PFDCAD dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpul data. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa TQM model PFDCAD diimplementasikan dengan kriteria fokus pada customer, manajemen berdasar fakta, melibatkan semua orang, dan perbaikan secara terus-menerus (Pathollah & Kamilah, 2021).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Abdul Azis di Pesantren Al-Al-Falah Symenep. Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen mutu terpadu di pondok pesantren Al-Falah Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Falah Sumenep Islamic Boarding School memiliki visi untuk menghasilkan pemimpin masyarakat (mundirul-qoum) dengan lima jiwa, yaitu jiwa ikhlas, mandiri, sederhana, ukhuwah Islamiyah, dan semangat kebebasan (Azis, 2022).

Implementasi Manajemen Mutu dalam Peningkatan Profesionalisme Guru diteliti oleh Muaz. Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen mutu dalam peningkatan profesionalisme guru di MTs Pesantren Asasul Huda Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berhasil merencanakan dan mengawal pelaksanaan pengembangan profesionalisme guru melalui program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, program sertifikasi bagi guru, program pelatihan keterampilan dan kompetensi, dan program supervisi pendidikan (Muaz et al., 2021).

Sedangkan penelitian tentang implementasi Manajemen Mutu Sekolah di Sekolah Berbasis Pesantren dilakukan oleh Nurhayati/ Penelitian ini membahas tentang sejauh mana penerapan lima pilar Total Quality Management (TQM) berbasis pesantren di SMP Multazam Semarang. Penelitian menunjukkan bahwa SMP Multazam Semarang melayani kebutuhan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, wali siswa, dan masyarakat (Nurhayati & Kasidi, 2021).

Sedangkan penelitian tentang upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Pondok

Pesantren dilakukan oleh Andy. Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen berbasis madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Harisul Khairaat Bumi Hijrah Tidore Provinsi Maluku Utara. Penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Harisul Khairaat Bumi Hijrah Tidore telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk menjamin mutu pendidikan dalam mencapai tujuan dan visi dan misi lembaga (Andy, 2021).

Dari penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan belum ada penelitian yang menjadikan Undang-undang Pesantren dan Sistem Penjaminan Mutu Pesantren. Bahkan belum ada yang fokus pada pelaksanaan atau implementasi undang-undang pesantren diimplementasikan melalui manajemen Sistem Penjaminan Mutu Pesantren, terlebih pada Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren di Indonesia secara umum, apalagi di Madura dengan karakteristik dan kekhasan tersendiri. Maka, hal inilah yang menjadikan penelitian tentang penjaminan mutu Satuan Pendidikan Muadalah berbasis Undang-undang Pesantren pada Tiga Pesantren Muadalah di Madura menarik untuk diteliti dan akhirnya diharapkan menjadi salah satu tawaran *role model* penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan Muadalah di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif multikasus di tiga pesantren muadalah di Madura. Sumber data para pengelola satuan pendidikan muadalah di Madura, dari Kiai dan guru-guru yang terlibat langsung dalam penjaminan mutu. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengatan, triangulasi dan pemeriksaan sejawat.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagi Pesantren, Majelis Masyayikh merupakan perumus sistem penjaminan mutu pesantren sesuai berdasar Undang-undang Pesantren. Meskipun Majelis Masyayikh sudah menghasilkan dokumen sistem penjaminan mutu, dan melakukan sosialisasi, para pengelola satuan pendidikan muadalah di Madura merasa belum mendapatkan sosialisasi tentang sistem penjaminan mutu satuan pendidikan muadalah,

seperti yang disampaikan oleh Kiai Ghazi selaku Pengasuh Tarbiyatul Muallimien al-Islamiyah (TMI) Al-Amien Prenduan berikut:

“Kemudian yang kedua tidak ada aturan eksternal atau pedomanlah, pedoman dan panduan yang rinci tentang penjaminan mutu di pesantren muadalah. Pemerintah juga belum merumuskan itu (Mubarak, 2023)”

Hal senada juga disampaikan oleh Moh. Hamzah selaku Ketua LPM TMI Al-Amien Prenduan.

“Di Bogor kemarin tidak ada sosialisasi tentang dokumen sistem penjaminan mutu pesantren muadalah, hanya sekedar gambaran umum tentang penjaminan mutu” (Arsa, 2023).

Ungkapan sejenis juga disampaikan oleh Moh. Badri, Wakil Kepala Madrasa Dirosatul Mu'allimien al-Islamiyyah (DMI) Al-Hamidy Pamekasan, saat memaparkan tentang penjaminan mutu pesantren berdasarkan Undang-undang Pesantren.

“sosialisasi masih kurang” (Badri, 2023).

Penjaminan mutu bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan menjadi penting karena penjaminan mutu yang biasa disebut dengan *quality assurance*, bisa dimaknai dengan *the standard of something when it is compared to other things like it*, yang bisa diartikan bahwa mutu atau kualitas merupakan ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan yang sama dengan hal lain (Mas, 2017).

Dalam pendidikan, mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif (Raharjo et al., 2019).

Berdasar Undang-undang Pesantren, Pesantren diamanahi untuk membentuk penjaminan mutu internal, dengan cara pembentukan Dewan Masyayikh yang bertugas dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, peningkatan profesionalisme serta kompetensi pengajar dan tenaga kependidikan, pelaksanaan ujian guna penentuan kelulusan berdasar kriteria mutu yang ditetapkan, serta penyampaian data santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh (Presiden, 2019).

Dalam penetapan pengelola dan penanggung jawab sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan muadalah, para pengelola berbeda-beda dalam menetapkan pengelola penjaminan mutu pesantrennya. Ada yang melekat dengan struktural yang ada, seperti yang dilakukan oleh DMI Al-Hamidy Pamekasan dan MMI Mathlabul Ulum Jambu.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Berikut:

“Di dalam susunan kepengurusan ada memang ee khusus

pengembangan pengembangan bakat dan semacamnya itu disatukan pada ee divisi pengurus yang ini pengembangan bakat. Jadi, contoh untuk santri yang mau diikutkan lomba baik itu lomba yang sifatnya pendidikan, biasanya digodok oleh tim yang memang ada di dalam pengembangan dan di Yayasan sendiri memang ada pengurus khusus. nanti khusus menantu-menantu kiai yang memang mempunyai tugas untuk penjagaan melestarikan kualitas<sup>1</sup>”

Meskipun tidak secara formal membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penjaminan mutu pesantren, para *gus* ataupun menantu Kiai berperan langsung dalam pejagaan mutu pesantren. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh informasi yang disampaikan oleh Madani, salah satu guru di DMI Al-Hamidy berikut:

“Penjaminan mutu pelaksana utamanya itu dari keluarga jadi memang ada menantu ada Putra kiai yang bagian menantu ini memang difokuskan untuk menjaga mutu pendidikan pesantren *asma* (namanya, pen) Gus Zainal Abidin yang beliau memang ditunjuk khusus untuk menjaga kualitas pesantren. Khususnya di pendidikan bidang pendidikan jadi semua pendidikan konsultasinya ke Beliau dan setiap bulan diadakan evaluasi<sup>2</sup>”

Lebih lanjut, guru yang juga bertugas sebagai penanggung jawab pendataan ini menyampaikan bahwa kehadiran para keluarga Kiai dalam penjagaan kualitas pendidikan di pesantren ini tidak dilakukan secara formal.

“ya tidak cuman memang istilahnya sering ada sidak masuk ke kelas, kadang kajian-kajian di asrama, tiba-tiba ada beliau dicek, apakah berjalan<sup>3</sup>”

Hal yang sama juga terjadi di MMI Mathlabul Ulum Jambu Lenteng Sumenep. Di satuan pendidikan muadalah ini tidak membentuk unit kerja khusus yang mengelola penjaminan mutu.

“Ya, betul jadi semua kendali termasuk di dalamnya ee penjaminan mutu itu sendiri adalah di pundak pengasuh para pimpinan yang kemudian di dibantu oleh biro-biro atau bagian-bagian di bawahnya yang khusus menangani masalah pendidikan maka ada badan atau biro tertentu yang menangani pendidikan itu sendiri yang mengatasi semuanya baik itu kurikulum keguruannya bahkan pola kegiatan belajar mengajarnya<sup>4</sup>”

---

<sup>1</sup> Badri, “Wawancara tentang Penjaminan Mutu di DMI Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan.”

<sup>2</sup> Madani, “Wawancara tentang Penjaminan Mutu di DMI Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan,” 2023.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Imadul Haq, “Wawancara tentang Penjaminan Mutu di MMI Mathlabul Ulum Jambu Lenteng Sumenep,” 2023.

Apa yang terjadi di DMI Al-Hamidy Pamekasan dan MMI Mathlabul Ulum Jambu Sumenep tidak terjadi di TMI Al-Amien Prenduan. Satuan Pendidikan Muadalah yang ada di Sumenep ini, sudah membentuk unit kerja khusus, Lembaga Pemjamin Mutu (LPM), setidaknya sejak tahun 2022 TMI Al-Amien Prenduan sudah membentuk unit kerja khusus yang bertanggungjawab atas penjaminan mutu di lembaga ini seperti yang disampaikan oleh Ketua LPM TMI berikut:

“Setelah undang-undang itu lahir di mana di situ diamanahkan setiap Pesantren memiliki dewan masyayikh yang fungsi utamanya adalah sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren. Maka lembaga TMI Al-Amien Prenduan juga membentuk ee unit khusus yaitu lembaga penjaminan mutu pesantren TMI Al-Amien Prenduan<sup>5</sup>”

Kehadiran unit kerja khusus ini merupakan salah satu upaya dalam mengantisipasi perkembangan pendidikan di masa berikutnya.

“TMI dengan membentuk unit kerja ini, itu bagian dari antisipasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang sehingga diperlukan adanya unit khusus untuk menekuni penjaminan mutu ini secara lebih serius<sup>6</sup>”

Salah satu bentuk keseirusan TMI dalam membangun unit kerja ini adalah dengan dilaksanakannya perumuskan standar-standar pendidikan yang diupayakan oleh TMI.

“Unit ini terbilang baru sesuai amanah dan ee adanya unit ini kemudian lembaga TMI Al-Amien itu mulai merumuskan. Mulai merumuskan standar-standar pendidikan sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang itu walaupun masih dalam proses. Banyak hal yang akan dirumuskan melalui lembaga penjaminan mtu ini hingga pada akhirnya nanti rumusan-rumusan itu menjadi satu dokumen mutu yang bisa menjadi pedoman, bagaimana ee pendidikan Pesantren itu terus dijaga terus dirawat dan terus dikembangkan itu barangkali<sup>7</sup>”

Karena kesadaran inilah, LPM TMI Al-Amien Prenduaan mendapat dukungan penuh dari Pengasuh TMI Al-Amien Prenduan.

“Saya tidak terlalu menguasai tentang teknis penjaminan mutu ini berikut tahapan-tahapan kerjanya, tetapi saya selalu berupaya untuk memberikan dukungan penuh kepada lembaga penjaminan mutu termasuk ketika mereka mengusulkan adanya keterlibatan penuh dari masing-masing unit yang ada di TMI.

---

<sup>5</sup> Arsa, “Wawancara tentang Penjaminan Mutu di TMI Al-Amien Prenduan.”

<sup>6</sup> Mubarak, “Wawancara tentang Penjaminan Mutu di TMI Al-Amien Prenduan.”

<sup>7</sup> Arsa, “Wawancara tentang Penjaminan Mutu di TMI Al-Amien Prenduan.”



Kita sediakan dukungannya kita sediakan. Bahwa LPM kemudian membentuk unit-unit kerja di masing-masing marhalah di masing-masing idarah misalnya, tidak inisiatif dari saya langsung, tapi bagian dari dari upaya kerja yang dilakukan oleh LPM sebagai sebuah institusi.

Dukungan dari pengasuh TMI, Kiai Ghazi, juga nampak pada penyediaan sarana penunjang LPM TMI, dari hasil observasi ditemukan bahwa TMI Al-Amien Prenduan menyediakan ruang kerja yang representatif, dengan ruangan ber-AC, meja rapat, seperangkat computer lenngkap dengan printer dan koneksi internet. Selain itu, program kerja LPM TMI berjalan dengan baik. Misalnya, pada 26 Juni 2023, TMI telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan standar mutu TMI yang bertujuan agar setiap program yang berjalan di TMI memiliki landasan atau dasar yang bisa dikembangkan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para almarhum perintis Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan<sup>8</sup>.

Adapun standar yang direncanakan untuk disusun dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni: standar akademik dan non-akademik. Standar akademik berisi: Standar Mutu Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Mutu Guru, dan Standar Manajemen Sekolah. Adapun standar non-Akademik berupa: Standar Visi Misi, Standar Tata Pamong, Standar Penerimaan Santri Baru, Standar Pengasuhan, Standar Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, Standar Administrasi, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Alumni, Standar Pengelolaan Guru, Standar Pengelolaan Program Niha'ie, Standar Pengelolaan Rayon, Standar Penjaminan Mutu, dan Standar Layanan Perpustakaan (TMI, 2023).

Adapun konsep dasar penjaminan mutu TMI Al-Amien Prenduan tertuang dalam tabel berikut:

<b>PPEPP</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
P : Penetapan	Penetapan Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pengelola LPM TMI (1)</li> <li>2. Tersedianya gugus mutu di setiap idarah (1)</li> <li>3. Tersedianya tim penyusunan pernyataan isi (1) standar</li> <li>4. Tersedianya auditor mutu</li> </ol>

<sup>8</sup> tmial-amien.sch.id, "LPM TMI Al-Amien Prenduan Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Mutu."

	Penyusunan Dokumen Standar Mutu TMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbukukannya pernyataan isi standar (2)</li> <li>2. Tersedianya agenda kerja penjaminan mutu (2)</li> </ol>
	Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya website lpm.tmi.al-amien.sch.id (3)</li> </ol>
P: Pelaksanaan	Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Standar Mutu TMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersosialisasinya pernyataan isi standar kepada pengelola TMI (3)</li> <li>2. Terimplementasinya pernyataan isi standar ke dalam kegiatan pengelola TMI (3)</li> </ol>
	Survey Kepuasan Pengguna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersurveynya wali santri</li> <li>2. Tersurveynya santri</li> <li>3. Tersurveynya guru</li> </ol>
E: Evaluasi	Audit Mutu Internal (Sebelum UAS Semester II)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terealisasinya AMI pada setiap idarah</li> <li>2. Tersedianya laporan AMI oleh Auditor</li> <li>3. Tersedianya laporan <i>executive summary</i></li> </ol>
P: Pengendalian	Rapat Tinjauan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya RTM</li> <li>2. Tersedianya laporan RTM</li> <li>3. Tervalidasinya Rencana Tindak Lanjut (RTL) AMI oleh pengelola</li> </ol>
P: Peningkatan	Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar yang tercapai diupayakan ada pelampauan</li> </ol>

Meskipun sudah membentuk unit kerja khusus dalam penjaminan mutu, TMI Al-Amien tetap beranggapan bahwa pengawal mutu di sebuah pesantren tetap adalah Kiai. Sama dengan dua satuan pendidikan muadalah di Madura lainnya.

“Penjaga mutu utama itu adalah Kiai. Kiai di sini juga e dan pembantu-pembantunya. Jadi Kiai dan pembantu-pembantunya para Mudir, para guru-guru senior yang memang tradisi nilai-nilai falsafah-falsafah yang sudah dikembangkan dan sudah hidup sekian lamanya di pesantren ini. Barangkali Kiai guru-guru senior, mudir-mudir itulah ujung tombak dari penjaga, penjamin mutu pendidikan pesantren itu. Walaupun memang sebelum adanya undang-undang itu mereka tidak dilembagakan

dalam lembaga khusus yaitu lembaga penjaminan itu. Tetapi merekalah yang punya peran kuat, bagaimana nilai-nilai sistem pendidikan itu berlangsung dan sesuai dengan ee apa yang dirumuskan direncanakan sebelumnya” (Hamzah, 2023).

“kita menyadari bahwa bahwa penjaminan mutu itu atau upaya menjaga memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan manajemen dan sebagainya di TMI adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan ada atau tidak ada undang-undang itu itu sudah tuntutan dari amanah yang dibebankan kepada kita oleh para almarhumin para pendiri para muasis karena itu meskipun di awal-awal kita tidak punya lembaga khusus yang melakukan upaya untuk penjaminan mutu itu, tapi pada hakikatnya langkah-langkah untuk menjamin mutu itu sebetulnya sudah dilakukan oleh para masyaikh dahulu misalnya ketika mereka menuliskan secara rinci apa yang dimaksud dengan TMI, apa tujuannya visi misinya, instruksi landasan instruksionalnya dan sebagainya itu bagian dari langkah-langkah awal penjaminan mutu yang dilakukan oleh para masyayikh” (Mubarok, 2023).

Keberadaan pengelola penjaminan mutu pendidikan di pesantren sangat penting adanya, karena sistem penjaminan mutu pendidikan dibagi menjadi dua, yakni: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemdikbud, 2016).

Tapi keunikan ketiga satuan pendidikan muadalah di Madura dalam pengelolaan penjaminan mutunya adalah menjadikan Kiai sebagai tokoh utama sebagai penjamin mutu. Meskipun TMI Al-Amien Prenduan sudah berupaya

mengimplementasikan penjaminan mutu sesuai dengan Undang-undang Pesantren, pengelola TMI Al-Amien Prenduan tetap menjadikan Kiai sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab dalam penjaminan mutu.

Prilaku TMI Al-Amien Prenduan ini tidak bisa dilepaskan dengan tradisi pesantren itu sendiri yang menjadi Kiai sebagai penanggung jawab utama utu pesantren tidak bisa dilepaskan dari pemahaman bahwa Kiai memiliki otoritas mutlak dalam kepemimpinan di pesantren (Dhofier, 1984). Selain itu, Kiai adalah figur utama yang harus dipatuhi oleh masyarakat Madura. Bahkan masyarakat Madura, terutama pedesaan, mengkontruksi Kiai sebagai pemimpin duniawi dan ukhrawi. Bahkan bisa disejajarkan dengan Wakil Tuhan di dunia (Hefni, 2007).

#### **KESIMPULAN**

Pengelola satuan pendidikan muadalah di Madura melaksanakan penjaminan mutu dengan dua model pengelolaan, yakni pertama: melekatkan penjaminan mutu dengan tugas struktural pengelola pesantren, dan kedua, membentuk unit kerja khusus seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Pesantren.

Dari kedua model ini, semua satuan pendidikan muadalah di Madura menjadikan Kiai sebagai penanggungjawab utama mutu pesantren. Karena Kiai merupakan “pemilik” bahkan “raja” di Pesantren yang keberadaannya sangat menentukan masa depan Pesantren.

Kehadiran aturan penjaminan mutu yang dibuat oleh Majelis Masyayikh berdasar amanah Undang-undang Pesantren, akan menjadi babak baru dalam pengembangan pesantren. Meskipun harus disadari dan diyakini bahwa mutu pesantren sudah ada selama pesantren itu ada dengan kekhasan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy, A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Harisul Khairaat Bumi Hijrah Tidore Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 15(2), 141–157. <https://doi.org/10.30984/jii.v15i2.1504>
- Arsa, M. H. (2023). *Wawancara tentang LPM TMI*.
- Azis, A. (2022). IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU DI PONDOK PESANTREN AL-FALAH SUMENEP. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 5(1), 104–116. <https://doi.org/10.19105/re-jiem.v5i1.5390>
- Badri. (2023). *Wawancara tentang Penjaminan Mutu di DMI Al-Hamidy*.
- Budiman, A., Muhammad, B., Shofiyullah, & Saifullah, A. (2023). *Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin: Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Mutu*. Majelis Masyayikh.
- Dhofier, Z. (1984). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3ES.
- Ditpontren. (2023a). *Majelis Masyayikh Dorong Mutu Pesantren, Sosialisasi di Pesantren Khas Kempek Cirebon*. <https://www.majelismasyayikh.id/berita/majelis-masyayikh-dorong-mutu-pesantren--sosialisasi-di-pesantren-khas-kempek-cirebon>
- Ditpontren. (2023b). *Majelis Masyayikh kembali Libatkan Pengasuh Pesantren serta Stakeholders Pesantren guna Menyusun Dokumen Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren*. <https://www.majelismasyayikh.id/berita/majelis-masyayikh-kembali-libatkan-pengasuh-pesantren-serta-stakeholders-pesantren-guna-menyusun-dokumen-penjaminan-mutu-pendidikan-pesantren->
- Hamzah, M. (2019). TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN MUADALAH: ANTARA FAKTA HISTORIS DAN TANTANGAN MASA DEPAN. *Reflektika*, 13(1), 23–48. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.171>
- Hamzah, M. (2023). *Wawancara tentang Penjaminan Mutu di TMI Al-Amien Prenduan*.
- Hefni, M. (2007). Bhuppa'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis

- tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura). *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 12–20. <https://doi.org/10.19105/karsa.v11i1.144>
- Kemdikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Mas, S. R. (2017). *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Zahir Publishing.
- Muaz, Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Implementasi Manajemen Mutu dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di MTs Pesantren Asasul Huda Desa Ranjikulon | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8). <https://doi.org/doi.org/10.54371/jiip.v4i8.347>
- Mubarok, G. (2023). *Wawancara tentang Penjaminan Mutu di TMI Al-Amien Prenduan*.
- Nurhayati, A., & Kasidi, K. (2021). Implementasi Pilar-Pilar Manajemen Mutu Sekolah di SMP Multazam Semarang Berbasis Pesantren. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 2(1), 22–29. <https://doi.org/10.31331/jeee.v2i1.1684>
- Pathollah, A. G., & Kamilah, I. (2021). Implementasi TQM model PFDCAD dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren di PP Manbaul Ulum. *At-Tahsin : Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 30–43. <https://doi.org/10.59106/attahsin.v1i1.10>
- Pontren, D. P. D. (2012). *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah*. Kemenag RI.
- Presiden, R. I. (2019). *UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.
- Qomar, M. (2007). *Pesantren, dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga.
- Raharjo, S. B., Handayani, M., Jauhari, M. R., & Juanita, F. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- TMI, L. (2023). *Konsep Sederhana LPM TMI Al-Amien Prenduan*.
- Wahid, A. (2007). *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*. LKiS.